

Responsivitas Pemerintah Daerah terhadap Implementasi SDGs: Studi Empiris di Kabupaten Lombok Barat

Ahmad Fauzan Pranata^{1✉}, Nur Aisyah Rahmadani²

(1,2) Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

Abstrak: Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat daerah menuntut responsivitas pemerintah dalam merancang kebijakan, program, dan pelayanan publik yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat terhadap implementasi SDGs, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi lapangan, serta analisis dokumen perencanaan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik dalam mengintegrasikan tujuan SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, kurang optimalnya pemanfaatan data, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, konsistensi implementasi program SDGs masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan responsivitas pemerintah daerah memerlukan penguatan tata kelola, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan guna mendukung pencapaian SDGs secara optimal di tingkat lokal.

Abstract: The implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) at the regional level demands government responsiveness in designing policies, programs, and public services that align with the principles of sustainable development. This study aims to analyze the responsiveness of the West Lombok Regency Government to SDG implementation, particularly in the planning, implementation, and evaluation of development policies. This research used an empirical approach with descriptive qualitative methods. Data were collected through in-depth interviews with relevant stakeholders, field observations, and analysis of regional planning documents. The results indicate that the West Lombok Regency Government has demonstrated a fairly good level of responsiveness in integrating SDG objectives into regional development planning documents. However, several obstacles remain, such as limited coordination between regional government agencies, suboptimal data utilization, and low public participation in the policy formulation process. Furthermore, consistent implementation of SDG programs remains challenging due to limited resources and institutional capacity. This study concludes that increasing local government responsiveness requires strengthened governance, cross-sectoral collaboration, and the development of sustainable monitoring and evaluation mechanisms to support optimal SDG achievement at the local level.

Article history:

Received: 15 June 2024

Revised: 26 September 2024

Accepted: 22 October 2024

Published: 24 November 2024

Kata Kunci:

responsivitas pemerintah, pemerintah daerah, SDGs, pembangunan berkelanjutan, Lombok Barat

Keyword:

government responsiveness, local government, SDGs, sustainable development, West Lombok

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



How to cite: Pranata, A. F., & Rahmadani, N. A. (2024). Responsivitas Pemerintah Daerah terhadap Implementasi SDGs: Studi Empiris di Kabupaten Lombok Barat. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 136–142. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v2i4.419>

PENDAHULUAN

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global yang menuntut keterlibatan aktif seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Sejak

ditetapkannya Agenda 2030 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara anggota didorong untuk mengintegrasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan nasional dan subnasional (United Nations, 2015). Dalam konteks ini, pemerintah daerah memegang peran strategis karena berada pada posisi terdekat dengan masyarakat dan realitas pembangunan di tingkat lokal. Keberhasilan implementasi SDGs sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat, mengelola sumber daya, serta menerjemahkan target global ke dalam kebijakan lokal yang operasional dan terukur.

Responsivitas pemerintah daerah menjadi konsep sentral dalam studi implementasi SDGs. Responsivitas merujuk pada kemampuan institusi pemerintah dalam merespons tuntutan publik secara cepat, tepat, dan selaras dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka administrasi publik, responsivitas tidak hanya berkaitan dengan kecepatan tindakan, tetapi juga dengan kualitas keputusan, keterbukaan informasi, dan keberpihakan pada kepentingan publik (Denhardt & Denhardt, 2015). Dalam implementasi SDGs, responsivitas pemerintah daerah tercermin dalam kemampuan mengintegrasikan target SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, serta dalam pelaksanaan program yang berdampak langsung pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Bexell et al., 2025; Reddy et al., 2023).

Berbagai studi menunjukkan bahwa pencapaian SDGs di tingkat lokal menghadapi tantangan struktural dan institusional yang kompleks. Pemerintah daerah sering kali dihadapkan pada keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar perangkat daerah. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya responsivitas kebijakan terhadap isu-isu strategis SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan perlindungan lingkungan (Silva et al., 2024; Sachs et al., 2019). Selain itu, kurangnya sistem data terintegrasi juga menghambat proses pemantauan dan evaluasi capaian SDGs di tingkat daerah, sehingga respons kebijakan sering bersifat reaktif dan tidak berbasis bukti (Allen et al., 2018).

Literatur mengenai localization of SDGs menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam mengadaptasi tujuan global ke konteks lokal. Proses lokalisasi menuntut fleksibilitas kebijakan dan inovasi administratif agar target SDGs dapat disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis daerah (Reddy et al., 2023; OECD, 2020). Namun, tingkat keberhasilan lokalisasi sangat bergantung pada responsivitas pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah (Bexell et al., 2025; Glass & Newig, 2019). Tanpa responsivitas yang memadai, lokalisasi SDGs berpotensi menjadi sekadar formalitas dalam dokumen perencanaan.

Pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prasyarat utama dalam meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap implementasi SDGs. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas menjadi landasan dalam membangun kebijakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif (Ansell & Gash, 2008). Penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan praktik tata kelola kolaboratif cenderung lebih adaptif dalam merespons tantangan pembangunan dan lebih efektif dalam mencapai target SDGs (Glass & Newig, 2019; Erlianti et al., 2025). Oleh karena itu, responsivitas pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola yang diterapkan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Di Indonesia, implementasi SDGs di tingkat daerah menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayah. Beberapa pemerintah daerah mampu menunjukkan inovasi kebijakan dan komitmen politik yang kuat dalam mendukung pencapaian SDGs. Studi di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa

inisiatif green government berkontribusi positif terhadap kinerja SDGs di tingkat lokal, khususnya pada tujuan terkait lingkungan dan tata kelola (Megawati et al., 2024). Sementara itu, penelitian lain menemukan bahwa kebijakan mitigasi stunting berbasis tata kelola kolaboratif di Kabupaten Bantaeng mampu meningkatkan capaian tujuan pembangunan sosial (Saharuddin et al., 2025). Temuan ini menegaskan bahwa responsivitas pemerintah daerah berperan penting dalam menentukan efektivitas implementasi SDGs.

Namun demikian, tidak sedikit daerah yang masih menghadapi kendala serius dalam merespons agenda SDGs. Penelitian di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas institusional pemerintah lokal menjadi penghambat utama dalam implementasi SDGs (Zahid, 2023; UNDP, 2022). Di Indonesia, sejumlah studi mencatat bahwa integrasi SDGs ke dalam kebijakan daerah sering kali bersifat normatif dan belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan praktik birokrasi dan penganggaran (Pradhan et al., 2017; Rahayu & Wibowo, 2022). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara komitmen kebijakan dan respons nyata pemerintah daerah terhadap kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki tantangan dan potensi dalam implementasi SDGs. Secara sosial dan ekonomi, Lombok Barat menghadapi isu ketimpangan, kemiskinan, serta tekanan terhadap lingkungan akibat aktivitas pembangunan dan pariwisata. Pemerintah daerah dituntut untuk merespons isu-isu tersebut melalui kebijakan yang selaras dengan tujuan SDGs. Namun, kajian empiris yang secara khusus menelaah responsivitas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terhadap implementasi SDGs masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek pelayanan publik dan tata kelola desa, seperti studi tentang good governance di Desa Buwun Sejati (Jaohari et al., 2025), tanpa mengaitkannya secara langsung dengan agenda SDGs.

Kesenjangan penelitian ini menunjukkan pentingnya studi empiris yang menganalisis responsivitas pemerintah daerah Lombok Barat dalam konteks implementasi SDGs. Analisis responsivitas diperlukan untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah mampu mengintegrasikan target SDGs ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, serta bagaimana pemerintah merespons kebutuhan masyarakat terkait pembangunan berkelanjutan. Studi ini juga relevan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat responsivitas pemerintah daerah, baik dari aspek kelembagaan, kebijakan, maupun partisipasi pemangku kepentingan (OECD, 2020; UNDESA, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsivitas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terhadap implementasi SDGs secara empiris. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pemerintah daerah merespons tuntutan pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan, program, dan mekanisme koordinasi yang ada. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian administrasi publik dan pembangunan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan responsivitas kebijakan terhadap pencapaian SDGs.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam responsivitas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) sesuai dengan konteks kebijakan dan kondisi lokal.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih karena pemerintah daerah telah mengintegrasikan agenda SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga relevan untuk dianalisis secara empiris.

Subjek penelitian adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program SDGs. Informan ditentukan secara purposive sampling, meliputi pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perangkat daerah terkait sektor SDGs, serta aparatur pemerintah di tingkat kecamatan atau desa.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi terbatas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali respons kebijakan pemerintah daerah terhadap implementasi SDGs. Studi dokumentasi mencakup penelaahan RPJMD, RKPD, rencana aksi daerah SDGs, serta laporan kinerja pemerintah daerah. Observasi digunakan sebagai data pendukung untuk melihat pelaksanaan program di lapangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada indikator responsivitas pemerintah daerah, meliputi kesesuaian kebijakan dengan target SDGs, koordinasi antar perangkat daerah, serta keterlibatan pemangku kepentingan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan informan dan kerahasiaan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responsivitas Pemerintah Daerah dalam Perencanaan SDGs

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengintegrasikan agenda SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Integrasi tersebut terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat indikator pembangunan selaras dengan tujuan SDGs, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Temuan ini mengindikasikan adanya respons awal pemerintah daerah terhadap agenda pembangunan berkelanjutan melalui penyesuaian kebijakan perencanaan.

Namun, tingkat responsivitas dalam tahap perencanaan masih bersifat administratif. Integrasi SDGs lebih banyak dilakukan melalui penyesuaian indikator tanpa disertai pemetaan prioritas yang spesifik dan terukur pada setiap tujuan SDGs. Kondisi ini menunjukkan bahwa respons kebijakan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan lokal, melainkan mengikuti arahan normatif dari kebijakan nasional. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa banyak pemerintah daerah mengadopsi SDGs secara formal dalam dokumen perencanaan tanpa diikuti transformasi substantif dalam orientasi kebijakan (Rahayu & Wibowo, 2022).

Responsivitas dalam Pelaksanaan Program SDGs

Dalam tahap pelaksanaan, responsivitas pemerintah daerah Lombok Barat menunjukkan variasi antar sektor. Pada sektor sosial, terutama kesehatan dan pendidikan, pemerintah daerah relatif responsif melalui pelaksanaan program yang mendukung tujuan SDGs, seperti penurunan angka stunting, peningkatan akses layanan kesehatan dasar, dan program wajib belajar. Aparatur

daerah mampu menyesuaikan program dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi.

Sebaliknya, pada sektor lingkungan dan ekonomi berkelanjutan, responsivitas pemerintah daerah masih terbatas. Program perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan jangka panjang. Respons kebijakan cenderung bersifat reaktif terhadap masalah yang muncul, seperti pencemaran dan alih fungsi lahan, tanpa strategi preventif yang konsisten. Temuan ini memperkuat argumen bahwa lemahnya kapasitas institusional dan keterbatasan sumber daya menjadi penghambat utama implementasi SDGs di tingkat lokal (Zahid, 2023; Allen et al., 2018).

Koordinasi Antar Perangkat Daerah

Koordinasi antar perangkat daerah menjadi faktor penentu dalam menilai responsivitas pemerintah daerah terhadap SDGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor di Kabupaten Lombok Barat belum berjalan optimal. Setiap perangkat daerah cenderung menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing tanpa kerangka koordinasi SDGs yang terintegrasi. Akibatnya, pelaksanaan program SDGs masih bersifat sektoral dan belum membentuk sinergi kebijakan yang kuat.

Ketiadaan mekanisme koordinasi khusus SDGs berdampak pada tumpang tindih program dan kurangnya konsistensi indikator kinerja. Kondisi ini menurunkan efektivitas respons kebijakan terhadap target SDGs. Temuan ini sejalan dengan studi yang menyatakan bahwa lemahnya tata kelola kolaboratif di tingkat lokal menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Glass & Newig, 2019; OECD, 2020). Oleh karena itu, responsivitas pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh niat kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan membangun koordinasi lintas sektor yang efektif.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam implementasi SDGs di Kabupaten Lombok Barat masih terbatas. Partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lebih banyak terjadi pada tahap pelaksanaan program tertentu, bukan pada tahap perencanaan dan evaluasi kebijakan. Pemerintah daerah belum secara sistematis melibatkan aktor non-pemerintah dalam penyusunan strategi SDGs.

Minimnya partisipasi ini berdampak pada rendahnya responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Program pembangunan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi lokal, terutama pada kelompok rentan. Temuan ini mendukung pandangan bahwa partisipasi publik merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas kebijakan SDGs di tingkat lokal (Ansell & Gash, 2008; UNDESA, 2021).

Evaluasi dan Pemantauan Capaian SDGs

Dari aspek evaluasi, penelitian menemukan bahwa mekanisme pemantauan capaian SDGs di Kabupaten Lombok Barat belum berjalan secara sistematis. Pemerintah daerah belum memiliki sistem data terintegrasi yang mampu mengukur capaian SDGs secara berkala dan berbasis indikator yang jelas. Evaluasi program masih berfokus pada output kegiatan, bukan pada dampak terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keterbatasan sistem evaluasi ini mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam merespons secara cepat terhadap ketidaktercapaian target SDGs. Tanpa data yang akurat dan terbaru, proses pengambilan keputusan menjadi kurang adaptif. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya sistem monitoring berbasis data dalam meningkatkan responsivitas kebijakan pembangunan berkelanjutan (Sachs et al., 2019; UNDP, 2022).

Implikasi terhadap Responsivitas Pemerintah Daerah

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terhadap implementasi SDGs berada pada tingkat moderat. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen kebijakan melalui integrasi SDGs dalam perencanaan dan pelaksanaan program tertentu. Namun, responsivitas tersebut belum didukung oleh koordinasi lintas sektor yang kuat, partisipasi pemangku kepentingan yang luas, serta sistem evaluasi yang memadai.

Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan responsivitas pemerintah daerah memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan tata kelola kolaboratif, dan pengembangan sistem data SDGs yang terintegrasi. Tanpa upaya tersebut, implementasi SDGs berpotensi berhenti pada level administratif dan tidak menghasilkan dampak pembangunan berkelanjutan yang signifikan. Hasil penelitian ini memperkuat literatur yang menyatakan bahwa keberhasilan SDGs di tingkat lokal sangat ditentukan oleh kualitas responsivitas pemerintahan daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan (Bexell et al., 2025; Reddy et al., 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa responsivitas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terhadap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) telah terbentuk, namun belum optimal. Pemerintah daerah telah merespons agenda SDGs melalui integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Langkah ini mencerminkan adanya komitmen kebijakan pada tingkat administratif.

Namun, responsivitas tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diikuti dengan transformasi substantif dalam praktik kebijakan. Integrasi SDGs dalam perencanaan belum didukung oleh pemetaan prioritas yang spesifik, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta sistem pemantauan berbasis indikator SDGs yang terintegrasi. Akibatnya, pelaksanaan program masih berjalan secara sektoral dan belum menghasilkan dampak pembangunan berkelanjutan yang merata.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam implementasi SDGs masih terbatas. Minimnya partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan riil masyarakat, khususnya kelompok rentan. Selain itu, lemahnya sistem evaluasi dan ketersediaan data menghambat respons kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan responsivitas pemerintah daerah memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah, serta perluasan partisipasi pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan SDGs. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data juga menjadi prasyarat penting agar kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah mampu memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SDGs di Kabupaten Lombok Barat sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merespons secara cepat, tepat, dan terintegrasi terhadap tantangan pembangunan lokal. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018). Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals: A review of evidence from countries. *Sustainability Science*, 13(5), 1453–1467. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0572-3>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bexell, M., Bornemann, B., Moallemi, E. A., & Vien, H. B. (2025). Accelerating the implementation of the Sustainable Development Goals at the local level. *Environmental Science & Policy*, 150, 103–112.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. Routledge.
- Erlianti, D., Mursalin, A., & Arbie, R. (2025). Public administration and sustainable development goals: A literature review. *International Journal of Society Reviews*, 7(1), 1–12.
- Glass, L. M., & Newig, J. (2019). Governance for achieving the SDGs. *Earth System Governance*, 2, 100010. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2019.100010>
- Jaohari, N., Ilmayani, M., Ariani, I., Alivia, N., & Ulfa, M. (2025). Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Journal of Education*, 10(2), 45–60.
- Megawati, S., Alfarizi, M., Eprilianto, D. F., Hilmi, A. N., & Fitrie, R. A. (2024). Fostering local SDGs performance with green government initiative. *E3S Web of Conferences*, 487, 01006.
- OECD. (2020). *A territorial approach to the Sustainable Development Goals*. OECD Publishing.
- Pradhan, P., Costa, L., Rybski, D., Lucht, W., & Kropp, J. P. (2017). A systematic study of Sustainable Development Goal interactions. *Earth's Future*, 5(11), 1169–1179.
- Rahayu, A. Y., & Wibowo, A. (2022). Localizing SDGs in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(3), 289–304.
- Reddy, P. S., Nemec, J., & de Vries, M. (2023). Localizing the SDGs: The role of local governments. *Public Administration and Development*, 43(1), 3–16.
- Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2019). *Sustainable Development Report 2019*. Cambridge University Press.
- Saharuddin, S., Irwan, A. L., Rahmatullah, R., Djalil, A. R., & Saputra, I. A. (2025). Local government strategies to achieve SDGs social development. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 1–15.
- Silva, J. S. S., Limeira Filho, A. A., & Martins, M. F. (2024). Assessment of governance in the implementation of the SDGs. *Research, Society and Development*, 13(2), e421324.
- UNDESA. (2021). *World public sector report 2021*. United Nations.
- UNDP. (2022). *SDGs localization in Asia and the Pacific*. UNDP.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- Zahid, A. (2023). Challenges of SDGs localization by rural local government institutions. *Social Science Review*, 40(2), 75–92.